

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG SELATAN

JALAN KAPTEN TANTULAR (GKN II) NO. 4 DENPASAR 80235

TELP. (0361) 234803, 263891, FAX (0361) 234803



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastyastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan lindungan-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkarya untuk melanjutkan perjuangan mengamankan pendapatan negara demi keberlangsungan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor: ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Selatan sebagai unit kerja mandiri mempunyai kewajiban menyusun, menetapkan dan menyampaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan selama tahun 2024 telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan Tahun 2024 yang diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan Tahun 2024 yang terdiri dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan memberikan informasi tentang sasaran strategis, program, kegiatan dan perbandingan capaian kinerja organisasi tahun 2024 dengan Kontrak Kinerja Tahun 2024 yang terdiri dari :

1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif
6. Pengujian kepatuhan material yang efektif
7. Penegakan hukum yang efektif
8. Data dan Informasi yang berkualitas
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan merupakan salah satu bukti dalam mewujudkan visi, misi dan nilai Direktorat Jenderal Pajak sehingga pada akhirnya akan tercapainya masyarakat yang sadar dan peduli pajak.

Ultimate goal KPP Pratama Badung Selatan tahun 2024 berupa Pencapaian Penerimaan yang diukur melalui IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak. Pencapaian Penerimaan Pajak KPP Pratama Badung Selatan Tahun 2024 sebesar Rp.2.191.127.934.441,- atau 100.04% dari target tahun 2024 yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp.2.190.240.141.000,-. Suatu capaian yang pantas disyukuri mengingat selama tahun 2020 dan tahun 2021 penerimaan pajak KPP Pratama Badung Selatan tidak tercapai karena adanya Pandemi COVID-19 yang menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi di Bali khususnya wilayah kerja KPP Pratama Badung Selatan yaitu Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan mengalami penurunan secara signifikan.

Akhir kata, Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) ini seakurat mungkin sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

#Reform DJP. **SIAP. MANTAP! Salam Satu Bahu** Semangat dalam Kebersamaan Lanjutkan Ukir Prestasi. Tetap Fokus. Jangan Terlana.

Salam Sehat,
Wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om Santhi Santhi Santhi Om.

Denpasar, 24 Januari 2025
Kepala Kantor



Ditandatangani Secara Elektronik
Ni Dewa Agung Ayu Sri Liana Dewi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	III
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	1
C. Peran Strategis.....	2
D. Kekuatan sebagai Sumber Daya	4
E. Sistematika Pelaporan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Sasaran Strategis	9
B. Perjanjian Kinerja.....	11
C. Perencanaan Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja	17
C. Realisasi Anggaran.....	50
D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	51
E. Kinerja Lain-Lain.....	52
F. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.....	54
BAB IV PENUTUP	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD). Dalam penyusunannya, Laporan Kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) khususnya di lingkungan KPP Pratama Badung Selatan menyajikan ikhtisar capaian kinerja tahun 2024.

Selama tahun berjalan terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh DJP salah satunya adalah permasalahan dalam penerimaan pajak masih timbul akibat administrasi perpajakan yang belum optimal, rendahnya pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan serta FTAs, regulasi pemajakan atas perdagangan melalui transaksi elektronik yang belum rampung, dan basis data transaksi digital yang belum tersedia.

Selain itu, tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan di antaranya adalah ketidakpastian kondisi ekonomi global yang ditandai dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju. Risiko juga berasal dari harga komoditas yang masih fluktuatif serta perjanjian perdagangan bebas atau *Free Trade Agreement (FTA)* yang terus berkembang.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama Badung Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;

2. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
3. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
4. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
6. pemberian dan / atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
7. penyelesaian tindak lanjut pengajuan / pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
8. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan Penagihan Pajak;
9. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
10. penetapan, penerbitan, dan / atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
11. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
12. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
13. pemutakhiran basis data perpajakan;
14. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
15. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
16. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
17. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
18. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
19. pengelolaan dokumen perpajakan dan non perpajakan; dan
20. pelaksanaan administrasi kantor.

Secara Struktur Organisasi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan merupakan Instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Bali.

C. Peran Strategis KPP Pratama Badung Selatan

Salah satu fungsi KPP Pratama Badung Selatan yaitu pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan dibidang perpajakan, dimana menjadikan KPP Pratama Badung Selatan memiliki peran yang cukup strategis dalam upaya mengamankan rencana penerimaan negara demi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya kelangsungan roda pemerintahan dan roda pembangunan.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2024, KPP Pratama Badung Selatan memperoleh mandat untuk merealisasikan

pendapatan dari penerimaan sektor pajak sebesar Rp.2.190.240.141.000,- yang terdiri dari Pajak Penghasilan sebesar Rp. 1.753.654.011.000,-, PPN dan PPnBM sebesar Rp. 435.802.889.000,-, PPB dan BPHTB sebesar 151.553.000,-, dan Pajak Lainnya sebesar Rp.631.688.000,-.

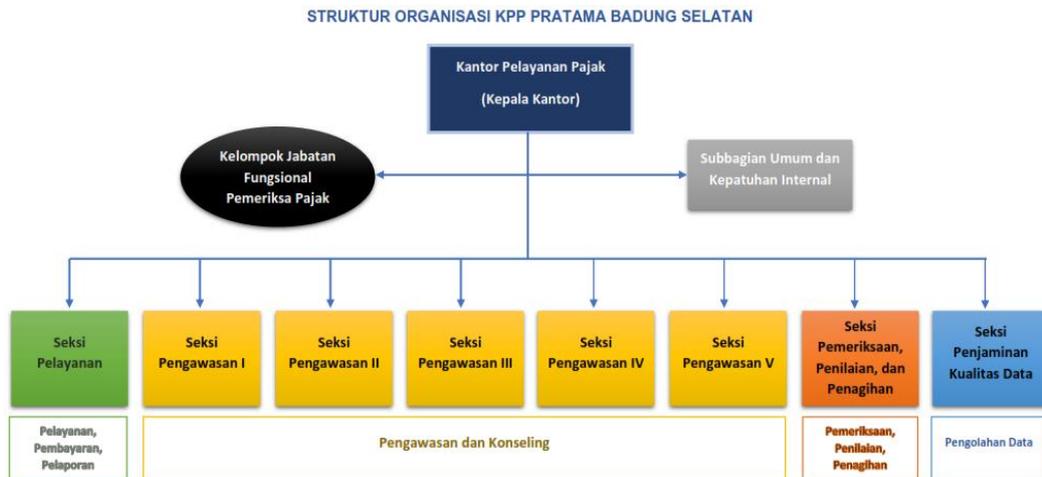
Sektor penerimaan pajak utama KPP Pratama Badung Selatan biasanya didominasi oleh Pariwisata khususnya Penyediaan Akomodasi dan Makanan-minuman, namun dalam kenyataannya kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama memiliki kendala. Berikut disampaikan beberapa permasalahan dan tantangan lainnya yang dihadapi di KPP Pratama Badung Selatan yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan memiliki aksesibilitas rendah dengan jarak terdekat antara lokasi kantor pajak dengan wilayah kerja kurang lebih 10km dan jarak terjauh antara lokasi kantor pajak dengan wilayah kerja adalah sebesar kurang lebih 25km.
2. Toko, restoran, hotel, dan jasa lainnya beberapa yang mengalami pailit/bangkrut dan digantikan dengan pelaku usaha yang baru sehingga perlu adanya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka pembaharuan data Wajib Pajak.
3. Kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya yang masih rendah, ditandai dengan Wajib Pajak tidak berminat mengikuti sosialisasi/penyuluhan pajak, adanya SPT yang tidak/terlambat disampaikan, tidak adanya tanggapan Wajib Pajak terhadap permintaan data dan/atau atau keterangan maupun tidak adanya itikad baik Wajib Pajak dalam melunasi kewajiban perpajakannya.
4. Total Pegawai pada KPP Pratama Badung Selatan belum mencukupi kebutuhan sesuai KEP-244/PJ/2021 tentang Penetapan Standar Formasi Pegawai di Lingkungan Unit Vertikal DJP dimana petugas *VAT Refund* ditetapkan sejumlah 6 orang. Akan tetapi, kenyataan dalam lapangan, dibutuhkan 8 orang petugas *VAT Refund* untuk memenuhi standar jam kerja dengan pola 6 hari kerja 1 hari libur dan pengaturan 3 shift per hari. Dapat disimpulkan bahwa dengan kurangnya SDM dalam pelaksanaan *VAT Refund* dapat menghambat kelancaran tugas pemberian layanan *VAT Refund* kepada turis asing.
5. Jangka waktu penyelesaian *VAT Refund* melalui *transfer* untuk setiap produk hukum yang terlalu cepat. Harapannya terdapat aturan untuk penyelesaian *VAT Refund* yang dipersamakan dengan penyelesaian SKPLB pada umumnya.

D. Kekuatan Sebagai Sumber Daya KPP Pratama Badung Selatan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan berada di bawah Kantor Wilayah DJP Bali dengan wilayah kerja terdiri dari 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Kuta yang terdiri atas 5 (lima) Kelurahan dan Kecamatan Kuta Selatan yang terdiri atas 6 (enam) Kelurahan, dengan total luas wilayah mencapai 11.865 Ha.

1. Organisasi



Bagan 1.
Struktur Organisasi KPP Pratama Badung Selatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan termasuk dalam kategori KPP Pratama Kelompok I dengan susunan organisasi yang terdiri dari Kepala Kantor sebagai pimpinan dengan membawahi :

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi

perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen yang berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

c. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

g. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, serta Seksi Pengawasan V

Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, serta Seksi Pengawasan V mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis

pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia yang ada di lingkungan KPP Pratama Badung Selatan sebanyak 93 pegawai ASN dan 5 Pegawai Non Organik dengan perincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan golongan :

No	Golongan	Jumlah
1	IV	8
2	III	51
3	II	34

2. Berdasarkan Jabatan :

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon III	1
2	Eselon IV	9
3	Account Representative	27
4	Fungsional Pemeriksa Pajak	14
5	Juru Sita Pajak Negara	2
6	Fungsional Penilai PBB	1
7	Fungsional Penyuluh	6
8	Administrator Sistem	1
9	Bendaharawan	1
10	Sekretaris	1
11	Petugas UP Restitusi PPN	1
12	Pelaksana	29

3. Berdasarkan Unit Organisasi

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Kantor	1
2	Seksi Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	11
3	Seksi Penjaminan Kualitas Data	4
4	Seksi Pelayanan	19

5	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	8
6	Seksi Pengawasan I	9
7	Seksi Pengawasan II	8
8	Seksi Pengawasan III	6
9	Seksi Pengawasan IV	6
10	Seksi Pengawasan V	7
10	Fungsional Pemeriksa Pajak	14

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang tersedia pada KPP Pratama Badung Selatan untuk menunjang pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut:

No.	Kode	Uraian	Jumlah
1	117111	Barang Konsumsi	175,072,906
2	132111	Peralatan dan Mesin	6,787,026,431
3	135121	Aset Tetap Lainnya	27,500,000
4	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5,733,588,799)
5	162151	Software	3.850.000
6	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	2,789,585,134
7	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	(2,788,416,956)
8	169315	Akumulasi Amortisasi Software	(3.850.000)
Jumlah			1,257,178,716

E. Sistematika Pelaporan

a. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang KPP Pratama Badung Selatan serta uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi beserta peran strategis atau tugas yang diberikan oleh instansi vertikalnya yaitu Kanwil DJP Bali, serta kekuatan berbagai sumber daya yang mendukung tercapainya program kerja KPP Pratama Badung Selatan dan Sistematika Pelaporan.

b. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2024, termasuk penjelasan addendum kontrak kinerja. Selain itu, berisi tentang gambaran singkat tentang rencana strategis dan rencana kinerja, sasaran yang dicapai pada tahun 2024 serta kaitannya dengan capaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program instansi.

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini menyajikan capaian kinerja KPP Pratama Badung Selatan Tahun 2024 dengan analisis uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja termasuk didalamnya perbandingan target awal

Tahun 2024 dengan capaian kinerja Tahun 2024, uraian upaya-upaya dalam rangka pencapaian target kinerja, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko, dan uraian rencana aksi tahun mendatang. Selain itu, dalam bab ini juga menguraikan realisasi anggaran unit kerja dalam.

d. Bab IV Penutup

Berisi tinjauan umum tentang tingkat capaian, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. Perencanaan instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan, nasional dan global.

A. SASARAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra Kantor Pelayanan Pajak Paratama Badung Selatan mengikuti unit vertikal Kantor Pusat DJP yang disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2020-2024.

Rencana Strategis KPP Pratama badung Selatan sudah ditetapkan di awal tahun 2024 dalam bentuk PETA STRATEGI yang disusun oleh Kepala Kantor dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait di KPP Pratama Badung Selatan dan Kanwil DJP Bali, sebagai langkah perencanaan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari KPP Pratama yaitu untuk melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang mewah, Pajak tidak langsung lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hal ini sejalan dengan visi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024

“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”

dan berjalan beriringan pula dengan misi Direktorat Jenderal Pajak yaitu:

- 1) Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- 2) Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi, dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
- 3) Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, professional, dan bermotivasi.

Visi dan misi DJP tersebut kemudian dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan program operasional. Direktorat Jenderal Pajak memiliki tujuan yaitu:

- 1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- 2) Penerimaan negara yang optimal; dan
- 3) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Dalam rangka mencapai tujuannya, DJP menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

- 1) Dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif;
- 2) Dalam tujuan dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal; dan
- 3) Dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah Organisasi dan SDM yang optimal, Sistem informasi yang andal dan terintegrasi, dan Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

Untuk mengukur pencapaian visi dan misi DJP, telah ditetapkan indikator-indikator kinerja utama (IKU) sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja.

Direktorat Jenderal Pajak juga turut andil dalam memberikan dukungan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

1. Rasio Perpajakan terhadap PDB.

Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.

2. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core tax administration system).

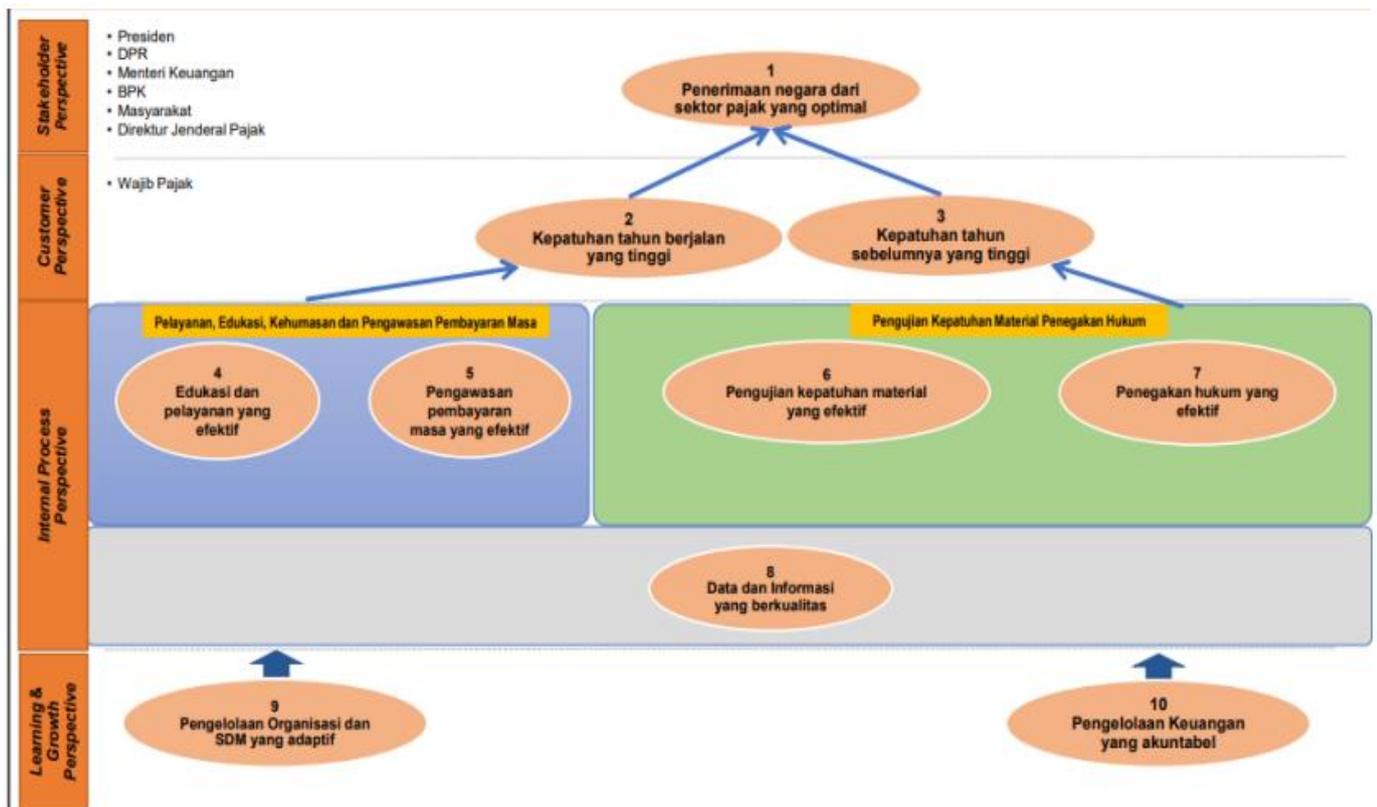
DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan system administrasi perpajakan yang terintegrasi

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan selaku penerima amanah dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali.

Perjanjian Kinerja tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan berpedoman pada visi dan misi Presiden, Renstra, Renja dan peraturan terkait pengelolaan kinerja. Peta Strategi DJP Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Peta Strategi



KPP Pratama Badung Selatan sebagai unit eselon III memiliki peta strategi yang berisi sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai beserta indikator kinerja utama sebagai alat ukurnya, yaitu:

1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal;
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif;
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif;
6. Pengujian kepatuhan material yang efektif;
7. Penegakan hukum yang efektif;
8. Data dan Informasi yang berkualitas;
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif; dan
10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Terkait Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mendatang, pada intinya penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.

C. PERENCANAAN KINERJA

Rencana Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan Tahun 2024 telah dituangkan dalam Kontrak Kinerja Kepala Kantor dengan persetujuan Kepala Kanwil DJP Bali. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, telah ditetapkan 20 (Dua Puluh) indikator kinerja utama (IKU) yaitu :

- a. Persentase realisasi penerimaan pajak;
- b. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas;
- c. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM);
- d. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi;
- e. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM);
- f. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan;
- g. Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan;
- h. Persentase pengawasan pembayaran masa;
- i. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
- j. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan;
- k. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu;
- l. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian;
- m. Tingkat efektivitas penagihan;
- n. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- o. Persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan;
- p. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP;
- q. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM;
- r. Indeks Penilaian Integritas Unit;
- s. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko; dan
- t. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.

**RINCIAN TARGET KINERJA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG
SELATAN TAHUN 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (skala 100)
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks Penilaian Integritas Unit	100

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4 (skala 100)	Y (skala 100)
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	23	48	48	75	75	100	100
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	23	48	48	75	75	100	100
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60	80	80	90	90	100	100
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25	50	50	75	75	100	100
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10	40	40	60	60	74	74
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5	5	10	5	15	85	100
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90	90	90	90	90	90	90
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100	100	100	100	100	100	100
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100	100	100	100	100	100	100
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100	100	100	100	100	100	100
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15	30	30	45	45	75	75
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25	50	50	75	75	100	100
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	20	50	50	80	80	100	100
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari IL AP	10	25	25	40	40	55	55
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	85	85	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Tahun 2024 KPP Pratama Badung Selatan telah menetapkan 10 (sepuluh) sasaran strategis (SS) dan 20 (dua puluh) indikator kinerja utama (IKU) untuk mengukur pencapaian sasaran strategis organisasi tersebut. Pencapaian kinerja organisasi tersebut disajikan pada tabel dibawah ini :

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective (30%)</i>				104.25
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			104.25
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	100.04%	100.04
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	110.00	110.00
<i>Customer Perspective (20%)</i>				102.16
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			103.68
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	99.99%	99.99
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	108.72%	108.72
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			100.64
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	100.64%	100.64
<i>Internal Process Perspective (25%)</i>				117.05
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			115.44
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	88.80%	120.00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100.00	110.87	100.87
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120.00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	120.00%	120.00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			119.23
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	117.90%	117.90

6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%	119.80%	119.80
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00	120.00	120.00
7	Penegakan hukum yang efektif			112.69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%	120.00%	120.00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%	117.94%	120.00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%	100.00%	100.00
8	Data dan Informasi yang berkualitas			117.88
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%	115.00%	115.00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55.00%	100.00%	120.00
<i>Learning & Growth Perspective (25%)</i>				116.44
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			112.87
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100.00%	117.50%	117.50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00	93.93	110.51
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90.00	99.55	110.61
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120.00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00	120.00	120.00
Nilai Kinerja Organisasi				110.08

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam peta strategi yang menjadi kontrak kinerja KPP Pratama Badung Selatan Tahun 2024 dapat tercapai.

1. Sasaran Strategis (SS) 1 : Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

Sasaran strategis ini memiliki tujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan pengawasan pembayaran masa, pengawasan kepatuhan material dan penegakan hukum, serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan. Target dan realisasi sasaran strategis ini ditampilkan sebagaimana pada tabel berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	104,25
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							104,25
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,04%	Max	E/L	26%	57,78%	100,04
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	110,00	Max	P/L	19%	42,22%	110,00

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1: Persentase realisasi penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak sebesar Rp.2.191.127.934.441,- atau mencapai 100.04% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.2.190.240.141.000,- atau 100.00%. Penerimaan pajak KPP Pratama Badung Selatan tercapai dengan rincian sebagai berikut:

Nama Unit	1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal						
	1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23%	48%	48%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	27,27%	61,22%	61,22%	70,04%	70,04%	100,04%	100,04%
Capaian	118,57%	127,54%	127,54%	93,39%	93,39%	100,04%	100,04%

KODE IKU	NAMA IKU	FORMULA IKU		TARGET		REALISASI	
				%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	Realisasi penerimaan pajak	X 100%	100,00%	2.190.240.141.000	100,04%	2.191.127.934.441
		Target penerimaan pajak			2.190.240.141.000		2.190.240.141.000

Jenis Pajak	Target	Realisasi	Netto Lalu	Capaian	Pertumbuhan
A. Pajak Penghasilan	1,753,654,011,000	1,638,170,291,748	1,121,822,927,734	93.41	46.03
B. PPN dan PPnBM	435,802,889,000	551,455,514,494	361,615,192,573	126.54	52.50
C. PBB dan BPHTB	151,553,000	151,553,154	0	100.00	0.00
D. Pendapatan PPh DTP	0	0	1,588,232,299	0.00	-100.00
E. Pajak Lainnya	631,688,000	1,350,575,045	667,956,077	213.80	102.20
JUMLAH (A + B + C + D + E)	2,190,240,141,000	2,191,127,934,441	1,485,694,308,683	100.04	47.48

Perbandingan antara realisasi tahun 2024 dengan kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	86,43%	85,34%	158,87%	106,10%	100,04%

Perbandingan Capaian Nasional (APBN) dengan Capaian KPP Pratama Badung Selatan dalam IKU Persentase realisasi penerimaan pajak:

Nama IKU	Realisasi Pendapatan Negara 2024	Realisasi KPP Pratama Badung Selatan
Persentase realisasi penerimaan pajak	Rp.2.842,5 T (101,4% dari target APBN) (Penerimaan Pajak 2024 sebesar Rp1.932,4 T)	Rp.2.191.127.934.441,- (100.04% dari target 100%)

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam upaya mencapai capaian penerimaan tahun 2024 antara lain:

- 1) Menghubungi wajib pajak melalui saluran telepon, *Whatsapp* (WA), *short message service* (SMS), *electronic mail* (Email) serta media sosial lainnya dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaporan dan pembaharuan profile wajib pajak
- 2) Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) berdasarkan data internal dan eksternal
- 3) Melakukan analisi atas data baik eksternal maupun internal
- 4) Melakukan usulan pemeriksaan khusus atau Daftar Sasaran Prioritas Penggalan Potensi (DSP3)
- 5) Mengirimkan daftar nominatif pemeriksaan rutin Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang menyatakan rugi tidak lebih bayar (RTLBB)
- 6) Penelitian secara manual sebelum melakukan tindakan penagihan
- 7) Optimalisasi tindakan penagihan
- 8) Pengawasan kepatuhan pembayaran masa melalui surat tagihan pajak (STP), dinamisasi dan data *matching*
- 9) Pengawasan kepatuhan material melalui bedah Wajib Pajak (WP), SP2DK, konseling, dan *visit*
- 10) Penggalan sumber penerimaan baru melalui analisa mandiri dan pemanfaatan data dari pihak ketiga

- 11) Melakukan *transfer* data/informasi/pengetahuan antar *account representative* (AR) terkait penggalian potensi

Dalam upaya mencapai realisasi penerimaan pajak di tahun 2025, rencana aksi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan pembayaran PPh Pasal 4 ayat 2 atas sewa/pengalihan/jual beli tanah dan/atau bangunan khususnya sewa *tenant mall*
 - 2) Melakukan *transfer* data/informasi/pengetahuan antar AR terkait penggalian potensi
 - 3) *Assignment* WP dengan pendekatan grup
 - 4) Pembuatan tim penggalian potensi per sektor
 - 5) Tindak lanjut data pemicu dan penguji, LHA, data *Transfer pricing* secara efektif
 - 6) Forum diskusi *account representative* dalam penggalian potensi
- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2: Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Realisasi capaian pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas Tahun 2024 sebesar 110.00% dari target 100%. Pertumbuhan pada Tahun 2023 dan 2024 memiliki pertumbuhan penerimaan yang tinggi. Adapun IKU tersebut diukur menggunakan dua komponen yaitu pertumbuhan nasional dan realisasi komponen perubahan historis. Rincian pertumbuhan penerimaan pajak bruto KPP Pratama Badung Selatan setiap Triwulan yaitu:

Nama Unit	1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal						
	1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	115,00%	105,00%	105,00%	110,00%	110,00%	110%	110%
Capaian	115,00%	105,00%	105,00%	110,00%	110,00%	110,00%	110,00%

KODE IKU	NAMA IKU	FORMULA IKU	TARGET		REALISASI	
			%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)	100	100%	110	110%
				100%		100%

Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPh migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBK, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Pengeluaran meliputi

belanja pemerintah pusat non utang dan non subsidi, belanja kewajiban SBN dan pinjaman luar negeri belanja subsidi energi dan non energi, belanja transfer ke daerah dan dana desa, serta pengeluaran pembiayaan. Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang terdapat pada target APBN/P, namun merupakan proyeksi riil terhadap pendapatan/belanja/pembiayaan yang dapat direalisasikan.

Sehingga pada manual IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas memiliki capaian sebesar 110%. Data tersebut berasal dari perhitungan (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan kas).

Perbandingan antara realisasi tahun 2024 dengan kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	74,17%	88,20%	120%	120%	110%

Upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Badung Selatan untuk mencapai target yaitu:

- 1) Menerbitkan SP2DK untuk para Wajib Pajak yang belum sepenuhnya menyampaikan pelaporan administrasi perpajakannya dengan benar baik pelaporannya maupun pembayarannya
- 2) Menerbitkan himbauan kepada para Wajib Pajak agar melakukan pelaporan perpajakannya
- 3) menerbitkan STP bagi para Wajib Pajak yang telah dalam melakukan pelaporan perpajakannya
- 4) menghubungi wajib pajak melalui saluran telepon, WA, SMS, Email serta media sosial lainnya dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaporan dan pembaharuan profile wajib pajak
- 5) Mengoptimalkan dan memastikan kewajiban perpajakan terkait Pengawasan pembayaran masa (PPM) terutama bagi wajib pajak wajib pajak
- 6) Melakukan penerbitan SP2DK dan/atau Himbauan
- 7) Mengidentifikasi Wajib Pajak yang sudah tidak beroperasi lagi;
- 8) Menerbitkan STP

- 9) Melakukan *visit*
- 10) Membuat Daftar Prioritas Pengawasan wajib pajak dengan membandingkan antara data CRM, Data Pemicu, dan Data Ability to Pay
- 11) Melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang termasuk dalam Daftar Prioritas Pengawasan
- 12) Melakukan pemutakhiran Wajib Pajak yang ada di Daftar Prioritas Pengawasan setiap awal Triwulan berikutnya
- 13) Memonitoring permohonan tax refund per minggu dalam setiap bulannya
- 14) Melakukan koordinasi terkait penerbitan SPMKP yang akan di-SP2D kan di bulan berjalan
- 15) Memantau trend penerimaan dan Data Billing MPN setiap bulannya

Dalam upaya mencapai realisasi realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas di tahun 2025, rencana aksi yang akan dilakukan adalah dengan mengoptimalkan dan memastikan kewajiban perpajakan terkait Pengawasan pembayaran masa (PPM) terutama bagi wajib pajak wajib pajak.

2. Sasaran Strategis (SS) 2 : Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

Sasaran ini memiliki tujuan untuk meningkatkan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal. Target dan realisasi sasaran strategis ini ditampilkan pada tabel sebagaimana berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Customer Perspective							20,00%	102,16
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							103,68
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	99,99%	Max	E/L	26%	57,78%	99,99
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	108,72%	Max	P/L	19%	42,22%	108,72

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 3 : Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Tujuan dari IKU tersebut yaitu memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengawasan pembayaran masa. Berikut merupakan realisasi dan capaian selama tahun 2024:

Nama Unit	2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi						
	2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23%	48%	48%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	27,58%	62,26%	62,26%	70,01%	70,01%	99,99%	99,99%
Capaian	119,91%	129,71%	129,71%	93,35%	93,35%	99,99%	99,99%

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Kanwil DJP Bali nomor ND-6468/WPJ.17/2024 tanggal 31 Desember 2024, terdapat perubahan target realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) menjadi sebesar Rp. 2.021.155.873.000,- sehingga per Triwulan IV capaian realisasi KPP Pratama Badung Selatan menjadi Rp.2.020.963.012.772 atau sebesar 99,99% dari target 100%.

Perbandingan antara realisasi tahun 2024 dengan kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	81,59%	170,85%	104,25%	99,99%

Upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Badung Selatan untuk mencapai target yaitu:

- 1) Penyisiran wilayah untuk mengenali wilayah dan usaha Wajib Pajak
- 2) Penerbitan STP
- 3) Penambahan Wajib Pajak untuk menambah basis penerimaan pajak melalui kegiatan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDLD) sebagai bahan analisis
- 4) Dinamisasi angsuran PPh Pasal 25
- 5) Melakukan kerjasama dengan *stakeholder* dalam rangka peningkatan kepatuhan formal maupun material
- 6) Pengawasan pembayaran masa atas WP penentu penerimaan melalui surat maupun komunikasi informal
- 7) Penelitian potensi STP, dinamisasi dan data matching atas Wajib Pajak pengawasan
- 8) Komunikasi kepada WP Penentu penerimaan atas proyeksi pertumbuhan kegiatan usaha Tahun 2024
- 9) Konseling dan permintaan proyeksi bisnis WP Dominan
- 10) Mencari data statistik terkait kondisi *current* perekonomian

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk tahun mendatang yaitu:

- 1) Melakukan penelitian nilai material properti atas potensi kewajaran nilai pengalihan tanah dan/atau bangunan (PHTB)
- 2) Meneliti dan mengawasi validasi transaksi pengalihan berdasarkan data di Akta Jual Beli (AJB)

- 3) melakukan uji kemampuan Wajib Pajak dalam membayar biaya sehubungan dengan PHTB
 - 4) Konseling dan permintaan proyeksi bisnis WP Dominan
 - 5) Penelitian populasi STP, dinamisasi dan data matching
 - 6) Pencarian data statistik terkait kondisi *current* perekonomian
- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 4 : Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

IKU ini bertujuan untuk memantau dan menghitung persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak di KPP Pratama Badung Selatan. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi DJP dalam meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak. Berikut merupakan capaian selama tahun 2024:

Nama Unit	2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
	2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%	
Realisasi	79,60%	103,38%	103,38%	106,48%	106,48%	108,72%	108,72%	
Capaian	132,67%	129,23%	129,23%	118,31%	118,31%	108,72%	108,72%	

Pada tahun 2024, realisasi kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sebesar 108,72% yaitu 39.738 SPT dari total target sebesar 100% atau 33.993 SPT, dengan rincian badan sebanyak 7.277 SPT, Orang Pribadi Karyawan 21.286 SPT, dan Orang Pribadi Non Karyawan 3.665 SPT. Sehingga total jumlah Wajib SPT sebanyak 39.738 SPT. Dibandingkan dengan persentase capaian IKU Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan tahun 2023 sebesar 106,25%, maka terjadi peningkatan pada tahun 2024.

Perbandingan antara realisasi tahun 2024 dengan kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	71,49%	100,76%	100,61%	106,25%	108,72%

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, KPP Pratama Badung Selatan telah melakukan berbagai upaya sepanjang tahun 2024 antara lain:

- 1) Menghubungi wajib pajak melalui saluran telepon, WA, SMS, Email serta media sosial lainnya dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaporan dan pembaharuan profile wajib pajak
- 2) Mencocokan Daftar Wajib Pajak Wajib SPT Tahun 2024
- 3) Melakukan penyuluhan langsung
- 4) Mengirim himbauan pengisian SPT Tahunan PPh kepada Wajib Pajak melalui SMS/Whatsapp Blast
- 5) Memilih surat teguran dengan tujuan WP OP Non karyawan dan Wajib Pajak dengan penghasilan diatas enam puluh juta setahun (SPT Tahunan PPh 1770 S)
- 6) Pembuatan satuan tugas telepon

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun mendatang yaitu:

- 1) Membentuk tim satgas penyuluhan/sosialisasi pengisian SPT Tahunan PPh
- 2) Melakukan penyuluhan langsung tentang pengisian SPT Tahunan PPh
- 3) Melakukan program isi bareng SPT Tahunan PPh dengan karyawan hotel
- 4) Melakukan program isi bareng SPT Tahunan PPh ke banjar/desa
- 5) Melakukan program isi bareng SPT Tahunan PPh di aula GKN II
- 6) Melakukan koordinasi dengan seksi pengawasan sehubungan dengan data Wajib Pajak yang akan dilakukan sosialisasi
- 7) Melakukan koordinasi dengan Kanwil terkait permintaan relawan pajak dalam rangka mendukung pelaksanaan satgas SPT Tahunan PPh
- 8) Pemberdayaan relawan pajak sebagai duta pajak dan/atau konsultan kecil
- 9) Menghimbau WP untuk melaporkan SPT Tahunan PPh 2025 melalui wa/sms blast
- 10) Mencocokkan Daftar Wajib Pajak Wajib SPT Tahunan PPh Tahun 2025

3. Sasaran Strategis (SS) 3 : Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi

Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan. Target dan realisasi sasaran strategis ini ditampilkan pada tabel sebagaimana berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,64
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,64%	Max	E/M	21%	100,00%	100,64

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 5 : Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

Manual IKU ini bertujuan Memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengujian kepatuhan material. Berikut disampaikan capaian dan realisasi tahun 2024.

Nama Unit	3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi						
	3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	24,48%	45,80%	45,80%	70,35%	70,35%	100,64%	100,64%
Capaian	97,92%	91,60%	91,60%	93,80%	93,80%	100,64%	100,64%

Pada tahun 2024 target yang di tetapkan untuk kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) adalah 100% atau sebesar Rp.169.084.268.000,- dengan total realisasi sebesar Rp.170.164.921.669,- sehingga total persentase capaian sebesar 100,64%.

Perbandingan antara realisasi tahun 2024 dengan kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	-	149,22%	110,36%	137,38%	100,64%

Akar masalah yang terjadi pada tahun 2024 diantaranya sebagai berikut:

- 1) Tindaklanjut SP2DK Outstanding sudah cukup optimal dan SP2DK baru masih dalam proses penyelesaian.
- 2) Data internal masih membutuhkan klarifikasi dan tindak lanjut.
- 3) Untuk WP berorientasi Ekspor, masih terganggu dengan kondisi global.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam upaya mencapai target penerimaan pajak dari kegiatan PKM antara lain:

- 1) Analisis atas data baik eksternal maupun internal dalam rangka peningkatan pembayaran dan pengawasan kewajiban perpajakan
- 2) Melakukan penerbitan SP2DK atas data internal dan eksternal
- 3) Melakukan kunjungan atas Wajib Pajak yang telah diterbitkan SP2DK
- 4) Melakukan percepatan konseling

5) Penggalian potensi sektor dominan KPP

Dalam upaya mencapai realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) di tahun 2025, rencana aksi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dengan Kanwil sehubungan dengan penetapan target PKM
- 2) Melakukan uji kerugian pajak penghasilan Wajib Pajak Badan
- 3) Gali Potensi terhadap PPh Pasal 25/29
- 4) Memilih dan menetapkan DPP berdasarkan nilai potensi besar dan dapat dicairkan
- 5) Tindak Lanjut Daftar Prioritas Pengawasan (DPP)
- 6) Melakukan pemutakhiran Wajib Pajak yang ada di Daftar Prioritas
- 7) Membuat rencana aksi dalam rangka mitigasi risiko IKU Pengawasan Kepatuhan Material
- 8) Fokus audit prioritas analisis risiko AR
- 9) IHT pengolahan data dalam rangka percepatan pemeriksaan
- 10) Kolaborasi antara AR dengan pemeriksa pajak dalam fokus analisis potensi pajak (setiap Seksi Pengawasan dengan Tim FPP) dan konseling

4. Sasaran Strategis (SS) 4 : Edukasi dan pelayanan yang efektif

Sasaran strategis ini bertujuan untuk meningkatkan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. Target dan realisasi sasaran strategis ini ditampilkan pada tabel sebagaimana berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Internal Process Perspective</i>							25.00%	117.05
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115.44
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	88.80%	Max	E/M	21%	50.00%	120.00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100.00%	110.87%	Max	E/M	21%	50.00%	110.87

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 6 : Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

IKU ini bertujuan untuk memantau perilaku pelaporan dan pembayaran Wajib Pajak setelah dilaksanakannya kegiatan edukasi dan penyuluhan. Dengan peningkatan penyuluhan dan humas akan menunjang peningkatan pendapatan, peningkatan

kepercayaan stakeholder, dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak menuju pengamanan pendapatan negara. IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dihitung menggunakan rumus berikut: $IKU EP = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$

Nama Unit	4 Edukasi dan pelayanan yang efektif							
	4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%	
Realisasi	22,33%	60,51%	60,51%	87,45%	87,45%	88,80%	88,80%	
Capaian	223,30%	151,28%	151,28%	145,75%	145,75%	120,00%	120,00%	

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Realisasi persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada Tahun 2024 adalah sebesar 88.80% dari total target 74.00% sehingga menghasilkan indeks capaian 120%. Proporsi capaian yaitu 18.50% kegiatan penyuluhan, 42.18% bayar, dan 28.12% lapor. Pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023, persentase capaian pada tahun 2023 sebesar 84.00%.

Perbandingan antara realisasi tahun 2024 dengan kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	84%	88,80%

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, KPP Pratama Badung Selatan telah melakukan berbagai upaya extra effort sepanjang tahun 2024 antara lain:

- 1) Melaksanakan penyuluhan maupun kelas pajak kepada Wajib Pajak secara online dan/atau tatap muka dengan melibatkan relawan pajak;
- 2) Melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak baik secara online, tatap muka, maupun melalui sosial media

- 3) Melaksanakan Kelas Pajak
- 4) Melaksanakan Pajak Bertutur ke Sekolah SD/SMP/SMA dan Universitas
- 5) Melaksanakan konsultasi dengan WP yang masuk CRM X3Y3 PPS
- 6) Melaksanakan kegiatan edukasi terkait tema 3 secara one on one dan one to many sesuai dengan WP yang masuk kriteria CRM
- 7) Melaksanakan kegiatan edukasi sekaligus pojok pajak terkait pengisian SPT Tahunan

Sebagai upaya mencapai peningkatan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan ke depannya, KPP Pratama Badung Selatan berkomitmen melakukan hal berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja periodik penyuluhan dengan berdasarkan risiko kepatuhannya;
- 2) Melakukan edukasi perpajakan yang lebih intensif dengan berbagai media untuk Wajib Pajak Baru dan Wajib Pajak Terdaftar;
- 3) Melakukan penyuluhan kepada wajib pajak dengan tema I, tema II, dan tema III;
- 4) Melaksanakan visit WP yang masuk dalam daftar DSPT.

b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 7 : Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

Indikator keberhasilan pencapaian target indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan. Survei tersebut mengukur antara lain:

- 1) Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- 2) Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan;

Tujuan dari IKU ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan dalam penyampaian pengetahuan dan informasi perpajakan kepada stakeholder serta pengelolaan reputasi dan persepsi atas DJP. Berikut disampaikan capaian dan realisasi tahun 2024:

Nama Unit	4 Edukasi dan pelayanan yang efektif						
	4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
Realisasi	6,17%	6,31%	12,48%	6,00%	18,00%	92,87%	110,87%
Capaian	123,40%	126,20%	124,80%	120,00%	120,00%	109,26%	110,87%

Pada tahun 2024 realisasi IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan Triwulan IV sebesar 92.87% dari target sebesar 85% dan total realiasi sampai dengan

Triwulan IV sebesar 110.87% dari target tahunan sebesar 100%. Dengan rincian Triwulan IV sebagai berikut:

- Pelayanan : 89.26%
- Penyuluhan : 89.93%

Capaian tahun 2024 meningkat dari tahun 2023, pada tahun 2023 persentase realisasi Triwulan IV sebesar 83.43% dari target sebesar 81.00% sehingga capaiannya sebesar 103.00%.

Perbandingan antara realisasi tahun 2024 dengan kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	85,97%	81,38%	95,43%	83,43%	110,87%

Upaya yang telah dilaksanakan untuk mencapai target yaitu:

- 1) Melayani WP sesuai dengan standar layanan yang telah di tetapkan
- 2) Melakukan percepatan layanan unggulan dengan memasang maklumat atau janji layanan atas permohonan pemindahbukuan yang standarnya dua puluh satu (21) hari menjadi sepuluh (10) hari (melakukan percepatan layanan)
- 3) Melakukan edukasi dan penyuluhan
- 4) Menyediakan fasilitas tempat pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah di tetapkan
- 5) Menyediakan sarana konsultasi melalui *live chat*
- 6) Mengumpulkan WP untuk disiapkan menjadi responden untuk melakukan pengisian survei

Sebagai upaya mencapai indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan ke depannya, KPP Pratama Badung Selatan memiliki rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Mempersiapkan daftar tambahan Wajib Pajak yang kooperatif yang sudah mendapat layanan langsung, sebagai persiapan jika ada permintaan tambahan *longlist*
- 2) Melaksanakan visit WP yang masuk dalam daftar DSPT

5. Sasaran Strategis (SS) 5 : Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif

Sasaran strategis ini bertujuan untuk pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan

sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal. Target dan realisasi sasaran strategis ini ditampilkan pada tabel sebagaimana berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 8 : Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a). Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b). Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Berikut disampaikan capaian dan realisasi tahun 2024.

Nama Unit	5 Pengawasan pembayaran masa yang efektif						
	5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120,00%	85,68%	85,68%	117,00%	117,00%	120,00%	120,00%
Capaian	133,33%	95,20%	95,20%	130,00%	130,00%	133,33%	133,33%

Indeks Capaian IKU presentase pengawasan pembayaran masa KPP Pratama Badung Selatan Tahun 2024 adalah 120% (realisasi 120% dengan trajectory 90%). Capaian tersebut lebih tinggi dari capaian tahun 2023 sebesar 120% (realisasi 110% dengan trajectory 90%).

Perbandingan antara realisasi tahun 2024 dengan kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	-	100%	104,80%	110%	120%

Upaya yang telah dilaksanakan untuk mencapai target yaitu:

- 1) Menindaklanjuti penerbitan STP Masa Nov 2022 sampai dengan tahun berjalan di Aplikasi Approweb.
- 2) Menyiapkan WP yang kira-kira akan dilakukan Dinamisasi PPh Pasal 25.

3) Melakukan tindak lanjut Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi

Sebagai upaya mencapai Persentase Pengawasan Pembayaran Masa ke depannya, KPP Pratama Badung Selatan memiliki rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Menerbitkan STP di atas Rp 10,000.
- 2) Melakukan penelitian kenaikan PPh Pasal 25.
- 3) Melaksanakan dan mengawasi DSPE;
- 4) Melakukan penelitian data perpajakan tahun berjalan (Data Matching).
- 5) Meneliti permohonan pengurangan PPh pasal 25 dengan seksama.

6. Sasaran Strategis (SS) 6 : Pengawasan Kepatuhan Material yang Efektif

Sasaran strategis ini bertujuan untuk kegiatan melakukan Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela. Target dan realisasi sasaran strategis ini ditampilkan pada tabel sebagaimana berikut.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							119.23
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	117.90%	Max	P/M	14%	33.33%	117.90
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%	119.80%	Max	P/M	14%	33.33%	119.80
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	33.33%	120.00

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 9 : Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

- 1) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
- 2) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) (Bobot 50%).

Capaian IKU persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan adalah sebagai berikut:

Nama Unit	6 Pengujian kepatuhan material yang efektif							
	6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	78,30%	90,21%	90,21%	105,12%	105,12%	117,90%	117,90%	
Capaian	78,30%	90,21%	90,21%	105,12%	105,12%	117,90%	117,90%	

Capaian KPP Pratama Badung Selatan pada tahun 2024 sebesar 117.90% dengan target sebesar 100%.

Perbandingan antara realisasi tahun 2024 dengan kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	107,06%	118,30%	120%	120%	117,90%

Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai target IKU Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Menerbitkan SP2DK ke Wajib Pajak sesuai dengan DPP Kolaboratif.
- 2) Membuat dan mengupload LHP2DK dan Berita Acara untuk SP2DK yang sudah direspon oleh Wajib Pajak
- 3) Melakukan visit dan undangan konseling atas Wajib Pajak yang belum merespon SP2DK

Dalam upaya mencapai target penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan di tahun 2025, rencana aksi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Menerbitkan SP2DK, dengan memperhatikan time line sesuai SE-05.
- 2) Pembahasan LHPt lebih intens dengan FPP.
- 3) Melakukan visit atau mengundang WP ke KPP untuk melakukan pembahasan atas SP2DK
- 4) penyelesaian P4DK dengan memberi penjelasan kepada WP atas adanya risiko pemeriksaan
- 5) Melakukan percepatan penyelesaian penerbitan LHPt dan LHP2DK.

- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 10 : Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
 IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Capaian IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Nama Unit	6 Pengujian kepatuhan material yang efektif							Pol/KP
	6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	107.51%	118.08%	118.08%	115.61%	115.61%	119.80%	119.80%	
Capaian	107.51%	118.08%	118.08%	115.61%	115.61%	119.80%	119.80%	

Capaian pada tahun 2024 IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan sesuai dengan Dashboard adalah sebesar 119,80% dengan rincian sebagai berikut:

Unit Kerja	Pemanfaatan Data STP							Pemanfaatan Data Matching				Persentase Capaian IKU Pemanfaatan Data	
	Target		Realisasi			Persentase STP %	Target		Realisasi		Persentase Data Matching %		
	Dafnom STP	Target STP	Dafnom	Selain Dafnom	Total		Nominal STP	Data Pemicu	Target Data Matching (80% Data Pemicu)	Ditindaklanjuti AR			Ditindaklanjuti WP
280 - KANTOR WILAYAH DJP BALI	18.822	18.829	23.902	9.771	33.673	111.433.531.409	120.00%	10.286	8.130	876	10.232	120.00%	120.00%
905 - PRATAMA BADUNG SELATAN	2.952	2.952	3.749	1.159	4.908	8.026.492.304	120.00%	1.195	945	85	1.374	120.00%	120.00%
SEKSI PENGAVRASAN I	637	637	777	179	956	3.782.208.979	120.00%	256	203	24	260	120.00%	120.00%
SEKSI PENGAVRASAN II	573	573	844	378	1.222	1.852.430.395	120.00%	189	148	16	196	120.00%	120.00%
SEKSI PENGAVRASAN III	532	532	631	202	833	1.202.540.745	120.00%	275	218	10	334	120.00%	120.00%
SEKSI PENGAVRASAN IV	625	625	803	288	1.091	766.502.989	120.00%	200	158	19	284	120.00%	120.00%
SEKSI PENGAVRASAN V	585	585	694	112	800	622.800.250	120.00%	275	218	16	300	120.00%	120.00%

Perbandingan antara realisasi tahun 2024 dengan kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	120%	119,80%

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target IKU persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti penerbitan STP Masa Pajak, baik dari Dafnom STP maupun di luar Dafnom STP.
2. Melakukan penelitian dan menindaklanjuti Data Pemicu selain tahun berjalan dengan menerbitkan LHPT maupun melalui imbauan.

Dalam upaya mencapai target IKU persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan di tahun 2025, rencana aksi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menerbitkan STP Masa Pajak, baik dari Dafnom STP maupun di luar Dafnom STP.
2. Melakukan penelitian dan menindaklanjuti Data Pemicu selain tahun berjalan dengan menerbitkan LHPT untuk DPP dan himbauan secara persuasif kepada Wajib Pajak.

- c. Indikator Kinerja Utama (IKU) 11: Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu merupakan rata-rata capaian Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu yang terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (30%), kualitas pelaksanaan komite kepatuhan (40%), dan Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (30%). Capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu adalah sebagai berikut:

Nama Unit	6 Pengujian kepatuhan material yang efektif							
	6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	110,00%	120,00%	120,00%	105,05%	105,05%	120,00%	120,00%	
Capaian	110,00%	120,00%	120,00%	105,05%	105,05%	120,00%	120,00%	

Realiasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 120% dari Target 100% sehingga indeks capaian menjadi sebesar 120%.

Perbandingan antara realisasi tahun 2024 dengan kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	120%

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Rapat Pembahasan DSP4 Semester I dan Semester II
2. Membuat laporan komite kepatuhan Triwulanan dengan tepat waktu.
3. Menetapkan KEP Komite Kepatuhan Tahun 2024

Dalam upaya mencapai target Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu di Tahun 2025, rencana aksi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menjalin koordinasi dengan para anggota komite kepatuhan

2. Menetapkan KEP Komite Kepatuhan terbaru dan Strategi Optimalisasi Penerimaan Tahun 2025

7. Sasaran Strategis (SS) 7 : Penegakan Hukum yang Efektif

Sasaran strategis ini bertujuan untuk menegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP. Target dan realisasi sasaran strategis ini ditampilkan pada tabel sebagaimana berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	117,94%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19%	36,54%	100,00

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 12 : Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur melalui 5 variabel yaitu:

- Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 40%, Bobot 25%)
- Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 70%, Bobot 25%)*
- Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tatacara perhitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tatacara perhitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan. Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian terdiri dari jumlah Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (60%) dan Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (40%).

Capaian IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian adalah sebagai berikut:

Nama Unit	7 Penegakan hukum yang efektif							
	7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120%	120%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Capaian pada tahun 2024 sebesar 120% dengan target sebesar 100%.

Perbandingan antara realisasi tahun 2024 dengan kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	141%	95,58%	112,73%	117,09%	120%

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat usulan pemeriksaan berdasarkan DSPP baik pada DSP4 Kolaboratif maupun DSPP RBP
- 2) Melakukan percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan sesuai dengan jangka waktu pemeriksaan

Dalam upaya mencapai target Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian di tahun 2025, rencana aksi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan sesuai dengan jangka waktu pemeriksaan untuk mengoptimalkan ruang terbit instruksi pemeriksaan
- 2) Meningkatkan kualitas pelaksanaan pemeriksaan untuk menghasilkan temuan pemeriksaan yang optimal.

b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 13 : Tingkat Efektivitas Penagihan

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

Tujuan pengukuran IKU ini yaitu untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder dan kepatuhan wajib pajak agar dapat menunjang dan mengamankan pendapatan negara yang optimal melalui peningkatan efektivitas tindakan penagihan.

Capaian IKU tingkat efektivitas penagihan adalah sebagai berikut:

Nama Unit	7 Penegakan hukum yang efektif							
	7b-CP Tingkat efektivitas penagihan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%	
Realisasi	23,73%	45,92%	45,92%	105,60%	105,60%	117,94%	117,94%	
Capaian	158,20%	153,07%	153,07%	234,67%	234,67%	157,25%	157,25%	

Capaian KPP Pratama Badung Selatan pada tahun 2024 sebesar 157.25%, dengan target sebesar 75% dan realisasi sebesar 117.94%. Realisasi 3 variabel Tingkat efektivitas penagihan:

- Evektivitas Tindakan Penagihan = 59.54% (bobot 50%)
- Tindak lanjut DSPC = 22.40% (bobot 20%)
- Pencairan DSPC = 36% (bobot 30%)

Perbandingan antara realisasi tahun 2024 dengan kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penagihan	-	112,71%	116,08%	90,30%	117,94%

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target IKU tingkat efektivitas penagihan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengawasan terhadap SKP/STP yang telah inkrah.
- 2) Pengawasan terhadap SKP/STP yang belum dilunasi setelah tanggal jatuh tempo
- 3) Penerbitan dan penyampaian tindakan penagihan melalui Surat Teguran, Surat Paksa, melakukan kegiatan penyitaan, pemblokiran, lelang, dan pencegahan.

Dalam upaya mencapai target Tingkat efektivitas penagihan di tahun 2025, rencana aksi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengawasan terhadap SKP/STP yang telah inkrah.
- 2) Pengawasan terhadap SKP/STP yang belum dilunasi setelah tanggal jatuh tempo
- 3) Penerbitan dan penyampaian tindakan penagihan melalui Surat Teguran, Surat Paksa, melakukan kegiatan penyitaan, pemblokiran, lelang, dan pencegahan.

c. Indikator Kinerja Utama (IKU) 14 : Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diukur dengan perbandingan antara Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah dengan Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah dikali 100%.

Capaian IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebagai berikut:

Nama Unit	7 Penegakan hukum yang efektif							
	7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Po/KP
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	100%	
Capaian	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	

Realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebesar 100% dari target tahunan sebesar 100% sehingga menghasilkan indeks capaian 100%.

Perbandingan antara realisasi tahun 2024 dengan kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	100%

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan monitoring terhadap usulan pemeriksaan Bukti Permulaan oleh komite kepatuhan
- 2) Melaksanakan identifikasi tindak pidana perpajakan sebagai bagian dari analisis atas kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang telah ditetapkan dalam DSP4
- 3) Sudah dilakukan pembahasan atas pengajuan usul Pemeriksaan Bukti Permulaan atas nota dinas nomor ND-1357/KPP.1705/2024 hal Usulan Bukti Permulaan tanggal 24 September 2024

Dalam upaya mencapai IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan di tahun 2025, rencana aksi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan monitoring terhadap usulan pemeriksaan Bukti Permulaan

- 2) Melaksanakan pengembangan dan analisis atas hasil kegiatan pengawasan dan pemeriksaan melalui kegiatan pengamatan atau kegiatan lain dalam rangka usulan pemeriksaan Bukti Permulaan
- 3) Forum AR tentang modul aplikasi baru di approweb terkait interoperabilitas dengan aplikasi Sigakum (ND-1265/PJ.05/2024)
- 4) Jangka waktu pengusulan pemeriksaan bukti permulaan dalam satu tahun sehingga dilakukan efektifitas dengan rencana pengusulan di Triwulan III dan IV setelah periode DPP semester I selesai untuk benar-benar menentukan Wajib Pajak yang terindikasi tindak pidana di bidang perpajakan
- 5) Sesuai dengan SE-1/PJ/2024 dimana terdapat perubahan yaitu bahwa usulan pemeriksaan bukti permulaan bisa langsung diusulkan oleh seksi pengawasan melalui tiga instrumen yaitu LHP2DK, LHPt atau LHK, oleh karena itu akan dilakukan inventarisasi atas ketiga instrumen tersebut yang layak untuk dinaikkan menjadi usul pemeriksaan bukti permulaan
- 6) Terhadap Wajib Pajak di luar DPP namun terdapat data yang mengarah pada tindak pidana perpajakan, akan dilakukan permintaan pendampingan pengamatan lapangan kepada Kanwil

8. Sasaran Strategis (SS) 8 : Data dan Informasi Yang Berkualitas

Sasaran strategis ini bertujuan untuk menghimpun data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan. Target dan realisasi ditampilkan pada tabel sebagaimana berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
8	Data dan informasi yang berkualitas							117.88
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%	115.00%	Max	P/M	14%	42.42%	115.00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55.00%	100.00%	Max	P/L	19%	57.58%	120.00

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 15: Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan/atau kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan. Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri

Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Capaian IKU penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah sebagai berikut:

Nama Unit	8 Data dan informasi yang berkualitas							
	8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%	
Realisasi	10.68%	72.63%	72.63%	84.61%	84.61%	115.00%	115.00%	
Capaian	53.40%	145.26%	145.26%	105.76%	105.76%	115.00%	115.00%	

Capaian tahun 2024 pada KPP Pratama Badung Selatan sebesar 115% dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar 115%. Capaian 2024 berasal dari persentase penyediaan data potensi perpajakan dengan perhitungan bobot sebesar 50% dan Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dengan perhitungan bobot sebesar 50%.

KODE UNIT KERJA	UNIT KERJA	Pengamatan			Penyediaan Data Potensi Perpajakan			Laporan Hasil Analisis			Realisasi i IKU	Trajectory s.d. Q4	Indeks Capaian
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
901	KPP PRATAMA DENPASAR BARAT	4	5.5	120.00%	890	2,070	120.00%				120.00%	93.33%	120.00%
902	KPP PRATAMA SINGARAJA	4	6.6	120.00%	690	901	120.00%				120.00%	93.33%	120.00%
903	KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR	4	4.4	110.00%	810	1,028	120.00%				115.00%	93.33%	120.00%
904	KPP MADYA DENPASAR	4	5.5	120.00%	380	334	87.89%				103.95%	93.33%	111.37%
905	KPP PRATAMA BADUNG SELATAN	4	4.4	110.00%	950	1,262	120.00%				115.00%	93.33%	120.00%
906	KPP PRATAMA BADUNG UTARA	4	5.5	120.00%	1050	1,608	120.00%				120.00%	93.33%	120.00%
907	KPP PRATAMA GIANYAR	4	7.7	120.00%	1150	1,644	120.00%				120.00%	93.33%	120.00%
908	KPP PRATAMA TABANAN	4	5.5	120.00%	810	1,070	120.00%				120.00%	93.33%	120.00%
280	KANWIL DJP BALI				6,740	9,692	120.00%	110	144	123.68%	121.84%	93.33%	120.00%

Perbandingan antara realisasi tahun 2024 dengan kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	88,03%	173,47%	126,25%	144,70%	115%

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target IKU penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan Visit
- 2) Melakukan penelitian secara daring
- 3) Memprioritaskan pengerjaan data yang lengkap
- 4) Membuat konsep ND Penetapan Target Penyediaan Data Potensi berdasarkan ND Kanwil Nomor ND-1382/WPJ.17/2024

- 5) Melakukan persetujuan validasi formal atas perekaman KPDL SE-11 oleh AR untuk kemudian data Non NPWP dilanjutkan ke aplikasi SidjNine-eksten

Dalam upaya mencapai IKU penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan di tahun 2025, rencana aksi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengadakan Diklat/Bimtek/IHT terkait Kegiatan Pengamatan
- 2) Melakukan komunikasi yang lebih intensif dengan atasan langsung terutama terkait penyelesaian KPDL
- 3) Melakukan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL)
- 4) Melakukan koordinasi dengan Seksi Pengawasan terkait perekaman KPDL SE-11
- 5) Melakukan pembahasan terkait Wajib Pajak yang akan menjadi target Kegiatan Pengamatan selanjutnya

- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 16: Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

Indikator kinerja utama persentase penghimpunan data regional dari ILAP bertujuan untuk mengawasi pihak pemberi data dalam menyampaikan data sesuai yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Perjanjian Kerja Sama antara DJP-DJPK-Pemerintah Daerah, serta bentuk kerja sama lainnya.

Capaian IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nama Unit	8 Data dan informasi yang berkualitas							
	8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%	
Realisasi	77,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	
Capaian	770,00%	400,00%	400,00%	250,00%	250,00%	181,82%	181,82%	

Capaian pada tahun 2024 sebesar 181,82%, dengan target sebesar 55% dan realisasai sebesar 100%.

Perbandingan antara realisasi tahun 2024 dengan kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	100%	100%

Pada tahun 2024 tindakan yang telah dilaksanakan dalam mencapai target IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP adalah sebagai berikut:

1. Mengirimkan surat permintaan data ILAP ke Pemda Badung
2. Mengirimkan surat permintaan ketersediaan data ke Pemda Badung
3. Melakukan visit langsung ke Pemda Badung
4. Menyampaikan data ILAP yang telah diterima dari Pemda Badung ke Kanwil DJP Bali

Adapun rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 antara lain melanjutkan koordinasi dengan KPP Pratama Badung Utara yang berada dalam satu wilayah Kabupaten, Kanwil DJP Bali, serta Pemda Kabupaten Badung.

9. Sasaran Strategis (SS) 9 : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Sasaran strategis ini bertujuan untuk menyelenggarakan manajemen sumber daya manusia untuk terwujudnya aparatur pajak yang berintegritas, profesional, memiliki keterikatan dan kebanggaan yang tinggi dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak serta mewujudkan organisasi yang mampu mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi Kementerian Keuangan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. Target dan realisasi sasaran strategis ini adalah:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	116,44
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,87
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,50	Max	P/M	14%	33,33%	117,50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00%	93,93%	Max	P/M	14%	33,33%	110,51
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,55	Max	P/M	14%	33,33%	110,61

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 17: Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Terdapat 2 (dua) komponen yang harus dipenuhi yaitu:

1. Komponen 1: Kualitas Kompetensi (50%) terdiri dari Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural, Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional, Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai.
2. Komponen 2: Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM (50%)

Capaian IKU tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nama Unit	9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	120,00%	186,28%	186,28%	142,76%	142,76%	117,50%	117,50%	
Capaian	120,00%	186,28%	186,28%	142,76%	142,76%	117,50%	117,50%	

Target pada tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 117,50%, sehingga total capaian IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM di Lingkungan KPP Pratama Badung Selatan sebesar 117,50%. Untuk Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum 100% pegawai lulus.

Perbandingan antara realisasi tahun 2024 dengan kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100%	100%	100%	100%	117,50%

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM:

- 1) Melakukan persiapan dan mendampingi assesse dalam pelaksanaan kegiatan Online Assesment Center dan Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan
- 2) Melakukan koordinasi dengan seksi PKD maupun Pengelola Assesment Center terkait penyediaan infrastruktur, sarana prasarana, Server, kesiapan jaringan
- 3) Menyusun Berita Acara pelaksanaan UKT, PKK, dan OAC
- 4) Membentuk kelompok belajar melalui WAG untuk sesi diskusi terkait materi yang diujikan

Adapun rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 antara lain:

1. Membentuk kelompok belajar melalui Whatsapp Group
2. Melakukan bimbingan (coaching) dengan atasan langsung
3. Melaksanakan kegiatan bintal secara rutin

b. Indikator Kinerja Utama (IKU) 18: Indeks Penilaian Integritas Unit

Indeks Penilaian Integritas Unit pada Kantor Pelayanan Pajak mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak) yaitu sebagai berikut:

- a) Indeks Pelayanan Perpajakan adalah penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
- b) Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
- c) Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
- d) Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak.

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional setelah responden selesai menerima layanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Indeks hasil survei dapat dikurangi dengan faktor koreksi, dengan rincian:

- a. Operasi tangka tangan (OTT) oleh Aparat Penegak Hukum (-5);
- b. Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (-6);
- c. Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (-3);
- d. Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH (-3).

Capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nama Unit	9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	-	-	-	85%	85%	85%	85%	
Realisasi	-	-	-	100%	100%	93,93%	93,93%	
Capaian	-	-	-	118%	118%	111%	111%	

Realisasi Survei Penilaian Integritas Unit pada KPP Pratama Badung Selatan Tahun 2024 sebesar 93,93% dari target Q4 sebesar 85,00% sehingga menghasilkan indeks capaian sebesar 110,51%.

Perbandingan antara realisasi tahun 2024 dengan kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	94,15%	95,09%	96,03%	93,93%

Kendala yang terjadi dikarenakan Pemahaman Wajib Pajak terhadap survei layanan perpajakan yang masih rendah sehingga Wajib Pajak tidak berminat menjadi responden, tidak mengisi survei atau mengisi survei tidak sesuai dengan kenyataan.

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target IKU Indeks Penilaian Integritas Unit:

- 1) Melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak sesuai dengan SOP dan ketentuan peraturan yang berlaku
- 2) Melakukan pelayanan adil, tepat dan akurat serta melakukan monev dalam rangka perbaikan pelayanan
- 3) Menindaklanjuti segera kritik, saran atau pengaduan/keluhan dari Wajib Pajak untuk meningkatkan kualitas pelayanan

Adapun rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 yaitu Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memitigasi risiko terjadinya layanan tidak sesuai dan/atau fraud, dan meningkatkan aspek layanan yang masih rendah dan memberikan pemahaman kepada WP terkait fungsi penting survei tersebut.

- c. Indikator Kinerja Utama (IKU) 19: Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko diperoleh dari jumlah Indeks implementasi manajemen kinerja dan Indeks implementasi manajemen risiko.

Dialog Kinerja Organisasi (DKO) adalah komunikasi formal antara pimpinan UPK dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala sebagaimana tercantum dalam KMK-300/KMK.01/2022. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Adapun Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko KPP Pratama Badung Selatan Tahun 2024 disajikan pada tabel sebagaimana berikut:

Nama Unit	9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							Pol/KP
	9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	
Target	23%	47%	47%	70%	70%	90%	90%	
Realisasi	71,30%	86,63%	86,63%	94,42%	94,42%	99,55%	99,55%	
Capaian	310,00%	184,32%	184,32%	134,89%	134,89%	110,61%	110,61%	

Data Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko
s.d. Periode Triwulan IV Tahun 2024

Kode IKU	Nama Kanwil	Nama Unit	s.d. Periode	Tahun	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja			Indeks Implementasi Manajemen Risiko	Realisasi	Target	Capaian
					Imbauan terkait Manajemen Kinerja	DKRO	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja				
10c-N	Kantor Wilayah DJP Bali	Kantor Wilayah DJP Bali	TW_IV	2024	17,50	17,50	15,00	50,00	100,00	90,00	111,11%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Bali	KPP Pratama Denpasar Barat	TW_IV	2024	17,50	17,50	15,00	50,00	100,00	90,00	111,11%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Bali	KPP Pratama Singaraja	TW_IV	2024	17,50	17,50	15,00	50,00	100,00	90,00	111,11%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Bali	KPP Pratama Denpasar Timur	TW_IV	2024	17,50	17,50	15,00	50,00	100,00	90,00	111,11%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Bali	KPP Madya Denpasar	TW_IV	2024	17,50	17,50	15,00	50,00	100,00	90,00	111,11%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Bali	KPP Pratama Badung Selatan	TW_IV	2024	17,50	17,50	14,55	50,00	99,55	90,00	110,61%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Bali	KPP Pratama Badung Utara	TW_IV	2024	17,50	17,50	14,44	50,00	99,44	90,00	110,49%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Bali	KPP Pratama Gianyar	TW_IV	2024	17,50	17,50	14,48	50,00	99,48	90,00	110,53%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Bali	KPP Pratama Tabanan	TW_IV	2024	17,50	17,50	14,25	49,62	98,87	90,00	109,85%

Capaian pada tahun 2024 sebesar 110,61%, dengan target sebesar 90% dan realisasi sebesar 99,55%.

Perbandingan antara realisasi tahun 2024 dengan kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	99,16%	100%	100%	100%	99,55%

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dengan seksi lain dalam pengumpulan penjelasan progres IKU, matriks tindak lanjut, LPKR, dan pemantauan pelaksanaan mitigasi risiko disertai dengan bukti pendukung relevan

- 2) Melakukan koordinasi dengan seksi lain dalam melakukan perhitungan, kompilasi data dan menyusun Laporan NKO untuk dibahas dalam rapat DKO
- 3) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan DKO dengan pemberian umpan balik oleh peserta rapat
- 4) Menyampaikan laporan NKO ke Kanwil DJP Bali tepat waktu
- 5) Menyampaikan laporan MR pada aplikasi Periskop tepat waktu

Adapun rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 yaitu:

- 1) Melakukan koordinasi intens dengan seksi lain agar laporan NKO dan MR dapat disampaikan dengan tepat waktu

10. Sasaran Strategis (SS) 10 : Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Sasaran strategis ini bertujuan untuk mewujudkan Penguatan pengelolaan keuangan menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Target dan realisasi sasaran strategis ini ditampilkan pada bagan sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120.00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00	120.00	Max	P/M	14%	100.00%	120.00

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) 20: Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA). DIPA harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Realisasi anggaran tahun 2024 KPP Pratama Badung Selatan sebagai berikut:

Nama Unit	10 Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	105,25%	105,16%	105,16%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	
Capaian	105,25%	105,16%	105,16%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Capaian pada tahun 2024 sebesar 120%, dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar 120%.

Formula IKU untuk Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran adalah sebagai berikut:

$$Q1, Q2, Q3 = 100\% \times IKPA$$

$$Q4 = (P1\% \times IKPA + P2\% \times SMART)$$

Keterangan: P1 dan P2 merupakan persentase bobot IKPA dan SMART berdasarkan formula dalam PMK terkait Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja Anggaran.

Berikut nilai IKPA pada KPP Pratama Badung Selatan

a. IKPA (50%)									
NO	UNIT KERJA	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	Capaian IKPA
		10%	15%	20%	10%	10%	10%	25%	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	KPP PRATAMA DENPASAR BARAT	100.00%	100.00%	99.65%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.93
2	KPP PRATAMA SINGARAJA	100.00%	100.00%	99.10%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	99.78
3	KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00
4	KPP MADYA DENPASAR	100.00%	100.00%	99.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	99.75
5	KPP PRATAMA BADUNG SELATAN	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.98%	100.00%	100.00
6	KPP PRATAMA BADUNG UTARA	100.00%	90.94%	97.01%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	97.55
7	KPP PRATAMA GIANYAR	100.00%	100.00%	86.80%	100.00%	100.00%	99.97%	100.00%	97.36
8	KPP PRATAMA TABANAN	100.00%	100.00%	97.43%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.49
9	KANWIL DJP BALI	100.00%	100.00%	93.30%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.66

c. IKKPA Triwulan IV							
KODE UNIT KERJA	UNIT KERJA	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	NKA	Indeksasi	Trajectory	Indeks Capaian
A	B	C	D	$E = (C \cdot 50\%) + (D \cdot 50\%)$	F	G	$H = F/G$
901	KPP PRATAMA DENPASAR BARAT	100.00	99.93	99.97	120.00	100	120.00%
902	KPP PRATAMA SINGARAJA	100.00	99.78	99.89	120.00	100	120.00%
903	KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR	100.00	100.00	100.00	120.00	100	120.00%
904	KPP MADYA DENPASAR	100.00	99.75	99.88	120.00	100	120.00%
905	KPP PRATAMA BADUNG SELATAN	100.00	100.00	100.00	120.00	100	120.00%
906	KPP PRATAMA BADUNG UTARA	100.00	97.55	98.78	120.00	100	120.00%
907	KPP PRATAMA GIANYAR	100.00	97.36	98.68	120.00	100	120.00%
908	KPP PRATAMA TABANAN	98.56	99.49	99.03	120.00	100	120.00%
280	KANWIL DJP BALI	100.00	98.66	99.33	120.00	100	120.00%

Beberapa akar masalah yang perlu dilakukan mitigasi yaitu perencanaan yang matang dalam hal belanja barang atau modal dalam jumlah besar, sehingga pelaksanaannya dapat dilaksanakan lebih baik dan perlunya kerjasama antar tim keuangan dalam menyusun rencana belanja setiap triwulan agar terlaksana dengan maksimal.

Perbandingan antara realisasi tahun 2024 dengan kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	93,78%	95,85%	94,18%	117,96%	120%

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran:

- 1) Menyediakan/mendiklatkan pegawai sebagai tenaga / pejabat pengadaan barang dan jasa secara jabatan, sehingga stok pejabat pengadaan selalu tersedia apabila ada mutasi.
- 2) Bekerjasama dengan KPP lain dalam hal rekomendasi rekanan yang dibutuhkan dengan kualifikasi terbaik
- 3) Melakukan koordinasi secara intens dengan pengelola keuangan KPP lain serta Kanwil untuk memastikan bahwa kondisi keuangan satker terkelola dengan baik, optimal, sekaligus meminimalisir pembayaran yang berpotensi tertunda
- 4) Berpartisipasi aktif dalam piloting sistem aplikasi keuangan terbaru (SAKTI) yang diadakan KPPN, serta melakukan konsultasi secara intens atas permasalahan aplikasi yang dialami

Adapun rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 yaitu:

- 1) Monitoring capaian IKPA secara rutin
- 2) Melakukan belanja sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan efisiensi

C. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, KPP Pratama Badung Selatan Tahun 2024 menggunakan dana yang bersumber dari dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Bagian Anggaran (BA) 015 Tahun 2024. Pengelolaan DIPA Tahun 2024 tersebut digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan dikelola sesuai dengan aturan-aturan keuangan yang berlaku dan menurut daftar alokasi yang ada. Sampai dengan akhir Tahun 2024 dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.722.790.285,- atau 98.32% dari pagu sebesar Rp 3.786.224.000,-. Besarnya dana yang tidak terserap sebesar Rp. 63.433.715,-.

Rincian Realisasi Anggaran Belanja untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian		Pagu Revisi	Realisasi TA 2024		SISA ANGGARAN
			s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA		3,786,224,000	3,722,790,285	98.32 %	63,433,715
CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	667,239,000	636,496,332	95.39 %	30,742,668
CC.4791	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	170,408,000	161,156,200	94.57 %	9,251,800
BM A	Data dan Informasi Publik	170,408,000	161,156,200	94.57 %	9,251,800
BMA.004	Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka ekstensifikasi	68,911,000	60,584,350	87.92 %	8,326,650
BMA.005	Formulir Kegiatan Pengumpulan Data	101,497,000	100,571,850	99.09 %	925,150
CC.4792	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	335,708,000	319,041,655	95.04 %	16,666,345
BM R	Komunikasi Publik	335,708,000	319,041,655	95.04 %	16,666,345
BMB.003	Layanan dan Konsultasi Perpajakan	256,208,000	255,111,640	99.57 %	1,096,360
BMB.005	Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan	79,500,000	63,930,015	80.42 %	15,569,985
CC.4794	Pengawasan dan Penegakan Hukum	161,123,000	156,298,477	97.01 %	4,824,523
BCE	Penanganan Perkara	82,883,000	80,888,049	97.59 %	1,994,951
BCE.001	Dokumen Penagihan Aktif	82,883,000	80,888,049	97.59 %	1,994,951
BIG	Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	78,240,000	75,410,428	96.38 %	2,829,572
BIG.003	Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan	24,721,000	24,547,443	99.30 %	173,557
BIG.004	Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Dalam Rangka Pengawasan	38,368,000	36,825,676	95.98 %	1,542,324
BIG.005	Laporan Penilaian	15,151,000	14,037,309	92.65 %	1,113,691
W A	Program Dukungan Manajemen	3,118,985,000	3,086,293,953	98.95 %	32,691,047
WA.4707	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	2,370,146,000	2,347,367,953	99.04 %	22,778,047
CA N	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	12,210,000	12,210,000	100.00 %	0
CAN.003	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	12,210,000	12,210,000	100.00 %	0
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,252,486,000	2,229,707,953	98.99 %	22,778,047
EBA.001	Kerumahtanggaan	194,010,000	185,580,746	95.66 %	8,429,254
EBA.994	Layanan Perkantoran	2,058,476,000	2,044,127,207	99.30 %	14,348,793
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	105,450,000	105,450,000	100.00 %	0
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.					
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir					
EBB.002	Peralatan Fasilitas Perkantoran	105,450,000	105,450,000	100.00 %	0
WA.4708	Pengelolaan Organisasi dan SDM	748,839,000	738,926,000	98.68 %	9,913,000
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	748,839,000	738,926,000	98.68 %	9,913,000
EBA.994	Layanan Perkantoran	748,839,000	738,926,000	98.68 %	9,913,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.					
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir					

D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

KPP Pratama Badung Selatan selain berfokus pada pencapaian IKU, juga melakukan efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki KPP Pratama Badung Selatan. Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mendukung kinerja instansi dalam pengelolaan administrasi perpajakan dan pelayanan kepada masyarakat. Efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan diantaranya adalah efisiensi pada bidang anggaran. Terkait dengan hal ini, KPP Pratama Badung Selatan menerbitkan Nota Dinas perihal Penegasan terkait Pertanggungjawaban dan Mekanisme

Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran KPP Pratama Badung Selatan Tahun 2024. Efisiensi anggaran bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang digunakan dapat memberikan hasil maksimal dengan biaya yang minimal. Hal ini dilakukan dengan merencanakan anggaran secara cermat, menghindari pemborosan, dan mengalokasikan dana dengan baik.

KPP Pratama Badung Selatan pun melakukan efisiensi dibidang pemanfaatan asset yang dimiliki. Dimana untuk memaksimalkan dan memfasilitasi pemberian konsultasi dan informasi bagi wajib pajak yang datang ke KPP, dibuatlah ruang Pojok Reform KPP Pratama Badung Selatan sebagai ruang konsultasi bagi wajib pajak dan media bagi pegawai yang bersangkutan dalam pemberian konsultasi dan pengetahuan terkait perpajakan. Ruang Pojok Reform ini dapat digunakan seluruh pegawai KPP Pratama Badung Selatan, yang utamanya dalam rangka pemberian konsultasi kepada wajib pajak, dan dapat digunakan sebagai lokasi untuk perekaman live di media sosial dalam rangka edukasi perpajakan secara online oleh penyuluh di KPP Pratama Badung Selatan.

Selain itu, KPP Pratama Badung Selatan juga melakukan efisiensi dibidang teknologi dimana dalam rangka peningkatan keamanan akses ke seluruh ruangan, maka seluruh ruangan di KPP Pratama Badung Selatan menggunakan kunci berkode. Penggunaan pintu dengan kunci berkode menjadi pilihan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, penggunaan kunci berkode memungkinkan tingkat keamanan yang lebih tinggi, karena hanya individu yang memiliki kode akses yang benar yang dapat memasuki ruangan tersebut. Ini adalah cara efektif untuk melindungi dokumen dan informasi berharga dari akses yang tidak sah atau potensi pencurian. Selain itu, pintu dengan kunci berkode memberikan fleksibilitas dalam manajemen akses. Kantor dapat dengan mudah mengubah kode akses jika diperlukan, tanpa harus mengganti seluruh sistem kunci fisik. Hal ini membuat manajemen keamanan menjadi lebih efisien, terutama dalam situasi dimana ada perubahan pegawai atau ketika perlu membatasi akses sesaat. Terakhir, penggunaan pintu dengan kunci berkode mengurangi risiko kehilangan kunci fisik, yang bisa menjadi masalah serius. Dengan kunci berkode, risiko ini diminimalkan, dan jika ada kekhawatiran tentang kebocoran kode, kode dapat dengan cepat diubah untuk menjaga keamanan ruangan.

E. Kinerja Lain-Lain

Selain berfokus pada realisasi pencapaian kinerja, berbagai penghargaan telah diterima oleh KPP Pratama Badung Selatan secara unit maupun pegawai secara individu didalamnya. Penghargaan yang telah diterima pada Tahun 2024 diantaranya:

1. Peringkat III Kantor Pelayanan Terbaik Tingkat Kantor Wilayah DJP Bali Tahun 2024

2. Satuan Kerja dengan Capaian IKU Indeks Kinerja Anggaran (IKA) Tahun Anggaran 2024 dengan Nilai Terbaik Rank 40 secara nasional
3. Satuan Kerja dengan Evaluasi Capaian Output (dalam hasil capaian IKPA) peringkat I secara nasional Tahun 2024
4. Piagam Kinerja Melebihi Target Penerimaan Pajak Tahun 2023
5. Peringkat II Satuan Kerja Dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Kategori Pagu Kecil (<5M) Tahun 2023
6. KPP Pengemas Dokumen Perpajakan Terbaik III Kanwil DJP Bali Tahun 2023
7. Piagam Kinerja Melebihi Target Penerimaan Pajak Tahun 2023
8. Terbaik Ke I KPP dengan Capaian Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Badan dan OP Tertinggi tahun 2023
9. Kantor Pelayanan Pajak dengan "Capaian Konversi Terbaik Pertama" Tingkat Kanwil DJP Bali
10. Kantor Pelayanan Pajak dengan "Capaian Realisasi PKM Pengawasan Kewilayahan Tertinggi Kedua" Tingkat Kanwil DJP Bali
11. Kantor Pelayanan Pajak dengan "Capaian Penerimaan Pajak dari Hasil Penilaian atas Usul Penilaian Tertinggi Pertama" Tingkat Kanwil DJP Bali
12. Unit Pelaksana Pemeriksaan dengan Capaian Success Rate Terbaik kedua Tingkat Kanwil DJP Bali
13. Unit Kerja Peraik Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran Terbaik Kedua Tingkat Kanwil DJP Bali
14. Pelaksana Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan Terbaik di Kanwil DJP Bali Tahun 2023
15. Kepala Seksi P3 Dengan Capaian Realisasi PKM Penagihan Terbaik Pertama di Kanwil DJP Bali Tahun 2023
16. Peringkat III Satuan Kerja Dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Kategori Pagu Kecil (<5M) Semester I Tahun Anggaran 2024
17. KPP dengan Pertumbuhan Neto Tertinggi dalam mencapai target penerimaan pajak Tingkat Kanwil DJP Bali 2023
18. Terbaik ke III KPP dengan Kontribusi Konten situs pajak.go.id dan Portal DJP Tahun 2023
19. Sebagai Unit Kerja Peraih Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Terbaik Pertama Tingkat Kanwil DJP Bali
20. Supervisor Fungsional Pemeriksa Pajak Terbaik Kedua Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil DJP Bali 2023

21. Supervisor Fungsional Pemeriksa Pajak Terbaik Ketiga Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil DJP Bali 2023
22. Account Representative Pengawasan Kewilayahan dengan Capaian Realisasi IKU Aktivitas PPM Tertinggi Ketiga di Kanwi DJP Bali
23. Juara II Lomba Bulu Tangkis Hari Pajak Kanwil DJP Bali Tahun 2023
24. Juara I Lomba Bulu Tangkis Hari Pajak Kanwil DJP Bali Tahun 2024
25. Juara II Lomba Gapple Hari Pajak Kanwil DJP Bali Tahun 2024
26. Juara III Lomba Catur Hari Pajak Kanwil DJP Bali Tahun 2024

F. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

KPP Pratama Badung Selatan merupakan satu-satunya KPP Pratama di Lingkungan Kanwil DJP Bali yang telah menyandang predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) yang didapatkan pada tahun 2020 dan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBBM) yang didapatkan pada tahun 2024. Untuk tetap menjaga dan menyandang predikat tersebut, telah dilakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi ZI menuju WBBM oleh Inspektorat Jenderal yang dilakukan dengan desk evaluation melalui aplikasi *Digital Integrity Assessment*, wawancara secara tatap muka, serta evaluasi lapangan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi ZI menuju WBBM oleh Tim Penilai Kementerian (TPK) terhadap KPP Pratama Badung Selatan, diperoleh hasil dengan Total Nilai 94,32 dari 100. Dimana berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, disimpulkan bahwa KPP Pratama Badung Selatan memperoleh usulan berkelanjutan predikat ZI menuju WBBM.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan tujuan/sasaran strategis instansi dan penggunaan anggaran berdasarkan kontrak kinerja yang telah ditetapkan yang mengacu pada rencana strategis serta visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Tahun 2024 telah sesuai dengan yang ditargetkan, bahkan hampir seluruh manual IKU nilai capaiannya diatas 100%.

Pada tahun 2024, KPP Pratama Badung Selatan berhasil mendapatkan prestasi atas kinerja yang telah terlaksana yaitu Peringkat III Satuan Kerja Dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Kategori Pagu Kecil (<5M) Semester I Tahun Anggaran 2024 dan Peringkat III Kantor Pelayanan Terbaik Tingkat Kantor Wilayah DJP Bali Tahun 2024.

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan antara lain peningkatan realisasi penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Wajib Pajak dan tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan, sehingga dapat memberi umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal, LAKIN ini harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan *stakeholder*, sehingga Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Badung Selatan



Ditandatangani secara elektronik
Ni Dewa Agung Ayu Sri Liana Dewi

